

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Rencana kerja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting bagi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang terstruktur akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pemungutan Liar
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018;
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memasukkan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

- II.1. Evaluasi Hasil Renja OPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA OPD

- III.1. Rencana program dan kegiatan dalam Renja OPD 2019

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA OPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2018

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu dan capaian Renstra OPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun lalu (tahun 2017), evaluasi capaian kinerja tahun 2018 bulan Januari sampai Maret 2017.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2014-2018 terdiri dari 10 program dan 35 kegiatan, yang terevaluasi sampai dengan tahun 2017 terdiri dari 10 program dan 34 kegiatan karena terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2014-2017 tetapi dilaksanakan pada tahun 2017. Evaluasi kinerja pelaksanaan renja dilakukan dengan membandingkan hasil perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun 2017 dengan target capaian kinerja Renstra tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat capaian realisasi target renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata-rata 15,47%, hal ini disebabkan evaluasi dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel I sebagai berikut :

TABEL I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 1 dari 3

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (2014-2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %							
2.12.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	3290 lembar	1590	500	483	97%	1200	3273	99%
2.12.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.01.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	12 unit	4	12	12	100%	12	28	233%
2.12.01.07	Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.01.08	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	236 unit	-	85	85	100%	115	200	85%
2.12.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 kali	65	45	45	100%	20	130	104%
2.12.01.19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kali	45	5	3	60%	0	48	96%
2.12.01.20	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %						0	0%
2.12.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit	1	0	0	0%	0	1	100%
2.12.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 unit	25	0	0	0%	0	25	100%
2.12.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	12 unit	12	0	0	0%	0	12	100%

LEMBAR : 2 dari 3

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1	0	0	0%	0	1	100%
2.12.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	5	12	5	42%	12	22	183%
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %						0	0%
2.12.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis	11 orang	11	0	0	0%	0	11	100%
2.12.06	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %						0	0%
2.12.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23 laporan	14	4	4	100%	5	23	100%
2.12.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	3 laporan	2	1	1	100%	0	3	100%
2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2.12.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya sistem informasi layanan gerak dan aduan								
2.12.23.01	Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terwujudnya sistem informasi layanan gerak dan aduan	4 aplikasi/perangkat	3	1	1	100%	0	4	100%
1.20.14.28	Program peningkatan pelayanan perizinan	Proses penyelesaian pelayanan dapat terpenuhi sesuai standar								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan								
	Penyediaan jasa pelayanan di bidang perizinan	Peningkatan pelayanan perizinan	100 %	65	0	0	0%	0	65	65%
	Fasilitas pengaduan masyarakat	Tersedianya fasilitas pengaduan	100 %	75	0	0	0%	0	75	75%
	Kajian/analisa indeks kepuasan masyarakat dan pelaporan perizinan	Tersedianya IKM dan laporan perizinan	100 %	100	0	0	0%	0	100	100%
	Sosialisasi pelayanan perizinan	Terlaksananya sosialisasi terhadap publik	100 %	75	0	0	0%	0	75	75%
	Penyusunan standar pelayanan ,standar pelayanan minimal ,maklumat pelayanan dan protap	Tersedianya penyusunan SP,SOP,Protap dan Maklumat Pelayanan	100 %	100	0	0	0%	0	100	100%
2.12.15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Koordinasi, perumusan kebijakan dan pembinaan BUD								
2.12.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terwujudnya potensi unggulan daerah	12 bulan	-	12	12	100%	0	12	100%
2.12.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penanaman modal	24 bulan	-	12	12	100%	12	24	100%
2.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terwujudnya dokumen RUPMK	1 keg	-	0	0	0%	1	1	100%
2.12.16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)								
2.12.16.04	Pengembangan system informasi penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal	24 bulan	-	12	12	100%	12	24	100%

LEMBAR : 3 dari 3

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.16.11	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 bulan	-	0	0	0%	12	12	100%
2.12.28	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan		-						
		Proses penyelesaian pelayanan dapat terpenuhi sesuai standar		-						
2.12.28.01	Penyediaan jasa pelayanan	Terpenuhinya layanan perizinan	9800 izin	-	4800	3640	76%	5000	8640	88%
2.12.28.03	Pengolahan data pelayanan perizinan	Terciptanya tertib administrasi perizinan	9800 izin	-	4800	3640	76%	5000	8640	88%
2.12.29	Program optimalisasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan perizinan		-						
2.12.29.02	Kajian/analisa penyusunan kebijakan pelayanan perizinan	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	2 keg	-	1	1	100%	1	2	100%
2.12.29.03	Monitoring, evaluasi dan laporan	Terciptanya zero complain governance	24 bulan	-	12	12	100%	12	24	100%

Pangkajene Sidenreng, 6 April 2018
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Sidenreng Rappang

H. NURSAMAN, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19590202 198702 1 005

II.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (Strengths and Weaknesses) dan kondisi eksternal (Oppurtunities and Threats) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
 - 1.1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Tersedianya Sumber Daya Manusia

- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana
 - c. Tersedianya dukungan dana
 - d. Tingginya motivasi dan etos kerja pegawai lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - e. Institusi yang memberikan pelayanan merupakan suatu kebutuhan di setiap daerah
 - f. Adanya dasar hukum tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 1.2. Kelemahan (Weaknesses)
- a. Masih terbatasnya SDM yang dimiliki
 - b. Kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki staf pelayanan perizinan
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki
2. Analisis Lingkungan Eksternal
- 1.1 Kesempatan (Oppurtunities)
- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
 - b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
 - c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern
- 1.2 Ancaman (Threats)
- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan
 - b. Adanya kebijakan teknis dari departemen sektoral yang mempengaruhi pelayanan perizinan.

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka antara faktor internal dan eksternal diadakan interaksi faktor. Hasil interaksi faktor adalah berupa 4 strategi yaitu :

a. Kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

- 1) Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

- 1) Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana, SDM yang tersedia, dan dukungan dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta melakukan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 2) Menggunakan azas pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;
- 2) Menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat;
- 5) Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

d. Mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan perizinan yang optimal;
- 2) Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen;
- 3) Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
- d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
- b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
- e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;
- f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.

- b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
- b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
- c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
- e. Pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : “ **Terwujudnya jasa pelayanan yang prima, transparan, berkualitas dan profesional** “

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan kelembagaan, sistem dan prosedur perizinan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan publik.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi pelayanan perizinan secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga perlu diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka ada beberapa perbaikan anggaran pada beberapa kegiatan dan penambahan kegiatan yang baru.

Untuk lebih jelas, kami sajikan review rancangan awal sebelum dan setelah dilakukan perbaikan dalam table berikut :

TABEL II
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		794,510	Program Pelayanan Adm. Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		839,125
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batu Lappa	Jumlah dokumen yang bermaterai	1200 lembar	5,700	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batu Lappa	Jumlah dokumen yang bermaterai	1400 lembar	6,300
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	71,070	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	78,850
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	125,700	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	47,800
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	12 bulan	10,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	12 bulan	10,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Batu Lappa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	12 unit	4,400	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Batu Lappa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	16 unit	5,200
	Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Batu Lappa	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	103,685	Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Batu Lappa	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	110,000
	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	30,005	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Batu Lappa	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	30,600
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Batu Lappa	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	115 unit	2,880	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Batu Lappa	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	120 unit	3,500
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Batu Lappa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	20 kali	45,147	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Batu Lappa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	20 kali	10,000

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 2 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Batu Lappa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	45,147	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Batu Lappa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kali	150,000
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batu Lappa	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	350,776	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batu Lappa	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	386,875
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		68,700	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		642,220
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Batu Lappa	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	0 unit	-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Batu Lappa	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	19 unit	130,369
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Batu lappa	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	0 unit	-	Pengadaan peralatan gedung kantor	Batu lappa	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	31 unit	243,430
	Pengadaan Mebeleur	Batu Lappa	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0 unit	-	Pengadaan Mebeleur	Batu Lappa	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	77 unit	91,241
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Batu Lappa	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0 unit	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Batu Lappa	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 kantor	100,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Dinas / Operasional	Batu Lappa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	68,700	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Dinas / Operasional	Batu Lappa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 unit	77,180
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Batu lappa	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	pasang	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Batu lappa	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	pasang	50,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Batu lappa	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 pasang	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Batu lappa	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 pasang	50,000

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 3 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		34,613	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50,050
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Batu Lappa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	28,791	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Batu Lappa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	38,250
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Batu lappa	Jumlah laporan keuangan semesteran	0 laporan	-	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Batu lappa	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	5,900
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Batu Lappa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5,822	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Batu Lappa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5,900
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		Koordinasi, perumusan kebijakan dan pembinaan BUD		15,373	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		Koordinasi, perumusan kebijakan dan pembinaan BUD		480,000
	Pengembangan Potensi unggulan daerah		Terwujudnya potensi unggulan daerah		-	Pengembangan Potensi unggulan daerah	11 kec	Terwujudnya potensi unggulan daerah	12 bulan	15,000
	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA		Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA		-	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Batu lappa	Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	2 kali	25,000
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	11 kec	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penanaman modal	12 bulan	15,373	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Batu Lappa	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penanaman modal	12 bulan	50,000
	Penignkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sidrap	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 bulan	-	Penignkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sidrap	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 bulan	50,000
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Tersedianya SDM yang berkualitas		-	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Batu Lappa	Tersedianya SDM yang berkualitas	12 bulan	30,000
	Penyelenggaraan pameran investasi		Terwujudnya pameran investasi		-	Penyelenggaraan pameran investasi	Batu Lappa	Terwujudnya pameran investasi	2 keg	250,000
	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah		Terwujudnya buku profil investasi		-	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Batu Lappa	Terwujudnya buku profil investasi	1 keg	30,000
	Penyempurnaan produk hukum bidang penanaman modal		Terwujudnya produk hukum penanaman modal		-	Penyempurnaan produk hukum bidang penanaman modal	Batu Lappa	Terwujudnya produk hukum penanaman modal	1 keg	30,000

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LEMBAR : 4 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		89,400	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		175,000
	Pengembangan system informasi penanaman modal	Batu Lappa	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal	12 bulan	52,400	Pengembangan system informasi penanaman modal	Batu Lappa	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal	1 paket	50,000
	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sidrap	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 bulan	37,000	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sidrap	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	- bulan	-
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		Tersusunnya sistem informasi penanaman modal di daerah		-	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Batu Lappa	Tersusunnya sistem informasi penanaman modal di daerah	12 bulan	50,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan		-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Batu Lappa	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	25,000
	Sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal		Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal		-	Sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal	Batu Lappa	Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal	1 keg	50,000
	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan			Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan		
			Proses penyelesaian pelayanan dapat terpenuhi sesuai standar		493,793			Proses penyelesaian pelayanan dapat terpenuhi sesuai standar		593,200
	Penyediaan jasa pelayanan	Batu Lappa	Terpenuhinya layanan perizinan	5000 izin	232,890	Penyediaan jasa pelayanan	Batu Lappa	Terpenuhinya layanan perizinan	5000 izin	256,200
	Pengolahan data pelayanan perizinan	Batu Lappa	Terciptanya tertib administrasi perizinan	5000 izin	260,903	Pengolahan data pelayanan perizinan	Batu Lappa	Terciptanya tertib administrasi perizinan	5000 izin	287,000
						Kajian/analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Batu Lappa	Tersedianya Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	1 dokumen	50,000
	Program optimalisasi pelayanan perizinan		Terselenggaranya kegiatan pelayanan perizinan		80,470	Program optimalisasi pelayanan perizinan		Terselenggaranya kegiatan pelayanan perizinan		155,000
	Kajian/analisa penyusunan kebijakan pelayanan perizinan	Batu Lappa	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	1 keg	49,910	Kajian/analisa penyusunan kebijakan pelayanan perizinan	Batu Lappa	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	2 keg	105,000
	Monitoring, evaluasi dan laporan	Batu Lappa	Terciptanya zero complain governance	12 bulan	30,560	Monitoring, evaluasi dan laporan	Batu Lappa	Terciptanya zero complain governance	12 bulan	50,000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Program dan Kegiatan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 memuat 8 Program dan 37 Kegiatan dengan kelompok sasaran yakni masyarakat dan petugas penyelenggara/pelaksana perizinan yang bergerak di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada perkiraan maju rencana tahun 2020 memuat 7 program dan 30 kegiatan.

Total kebutuhan dana/pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.984.595.000,-

Adapun rincian program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- 9) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 10) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 11) Pelayanan administrasi perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan :

- 12) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 13) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Mebeleur
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan :

- 17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan :

- 18) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 20) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Kegiatan :

- 21) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- 22) Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
 - 23) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 24) Peningkatan Kegiatan Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 25) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
 - 26) Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - 27) Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - 28) Penyempurnaan Produk Hukum Bidang Penanaman Modal
6. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
- Kegiatan :
- 29) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
 - 30) Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - 31) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 32) Sosialisasi Kebijakan Bidang Penanaman Modal
7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
- Kegiatan :
- 33) Penyediaan Jasa Pelayanan
 - 34) Pengolahan Data Pelayanan Perizinan
 - 35) Kajian/ Analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8. PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN

Kegiatan :

36)Kajian/ Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan

37)Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Adapun rumusan rancangan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada tabel III.1

TABEL III
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LEMBAR : 1 dari 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			839,125	APBD			865,425
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Batu Lappa	1400 lembar	6,300	APBD		1400 lembar	6,300
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batu Lappa	12 bulan	78,850	APBD		12 bulan	84,850
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Batu Lappa	12 bulan	47,800	APBD		12 bulan	48,400
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	Batu Lappa	12 bulan	10,000	APBD		12 bulan	10,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	Batu Lappa	16 unit	5,200	APBD		16 unit	5,200
	Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Batu Lappa	12 bulan	110,000	APBD		12 bulan	115,000
	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Batu Lappa	12 bulan	30,600	APBD		12 bulan	32,100
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Batu Lappa	120 unit	3,500	APBD		130 unit	3,700
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Kab.Sidrap	20 kali	10,000	APBD		20 kali	10,000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab.Sidrap	30 kali	150,000	APBD		32 kali	160,000
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Batu Lappa	12 bulan	386,875	APBD		12 bulan	389,875

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 2 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			642,220				742,220
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Batu Lappa	19 unit	130,369	APBD		19 unit	130,369
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Batu Lappa	31 unit	243,430	APBD		31 unit	243,430
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Batu Lappa	77 unit	91,241	APBD		77 unit	91,241
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Batu Lappa	1 kantor	100,000	APBD		1 kantor	200,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Batu Lappa	16 unit	77,180	APBD		16 unit	77,180
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batu Lappa		50,000				-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Batu Lappa	46 pasang	50,000	APBD		- -	-
	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50,050				50,050
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Batu Lappa	5 laporan	38,250	APBD		5 laporan	38,250
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Batu Lappa	1 laporan	5,900	APBD		1 laporan	5,900
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Batu Lappa	1 laporan	5,900	APBD		1 laporan	5,900
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Koordinasi, perumusan kebijakan dan pembinaan BUD			480,000				600,000
	Pengembangan Potensi unggulan daerah	Terwujudnya potensi unggulan daerah	11 kec	12 bulan	15,000	APBD		12 bulan	20,000

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 3 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Batu Lappa	2 kali	25,000	APBD		2 kali	35,000
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penanaman modal	Batu Lappa	12 bulan	50,000	APBD		12 bulan	75,000
	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Sidrap	12 bulan	50,000	APBD		12 bulan	75,000
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Tersedianya SDM yang berkualitas	Batu Lappa	12 bulan	30,000	APBD		12 bulan	35,000
	Penyelenggaraan pameran investasi	Terwujudnya pameran investasi	Batu Lappa	2 keg	250,000	APBD		2 keg	300,000
	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Terwujudnya buku profil investasi	Batu Lappa	1 keg	30,000	APBD		1 keg	30,000
	Penyempurnaan produk hukum bidang penanaman modal	Terwujudnya produk hukum penanaman modal	Batu Lappa	1 keg	30,000	APBD		1 keg	30,000
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			175,000				110,000
	Pengembangan system informasi penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal	Batu Lappa	1 Paket	50,000	APBD		- -	-
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersusunnya sistem informasi penanaman modal di daerah	Batu Lappa	12 Bulan	50,000	APBD		12 bulan	75,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Batu Lappa	12 Bulan	25,000	APBD		12 bulan	35,000
	Sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal	Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang penanaman modal	Batu Lappa	1 Keg	50,000	APBD		-	-
	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan			593,200				598,000
		Proses penyelesaian pelayanan dapat terpenuhi sesuai standar							
	Penyediaan jasa pelayanan	Terpenuhinya layanan perizinan	Batu Lappa	5000 Izin	256,200	APBD		5000 izin	258,000
	Pengolahan data pelayanan perizinan	Terciptanya tertib administrasi perizinan	Batu Lappa	5000 Izin	287,000	APBD		5000 izin	290,000
	Kajian/analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Batu Lappa	1 Dokumen	50,000	APBD		1 dokumen	50,000

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LEMBAR : 4 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program optimalisasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan perizinan			155,000				195,000
	Kajian/analisa penyusunan kebijakan pelayanan perizinan	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	Batu Lappa	2 keg	105,000	APBD		2 keg	120,000
	Monitoring, evaluasi dan laporan	Terciptanya zero complain governance	Batu Lappa	12 bulan	50,000	APBD		12 bulan	75,000
	JUMLAH				2,391,395				3,110,695

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu “ **Terwujudnya jasa pelayanan yang prima, transparan, berkualitas dan profesional** “ dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 6 April 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidenreng Rappang

H. NURSAMAN, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590202 198702 1 005